

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah hal yang wajib diterima oleh seluruh anak ataupun masyarakat yang ada di Indonesia. Dewasa ini pendidikan merupakan salah satu hal yang wajib diikuti oleh setiap orang, tanpa pendidikan akan dibawa kemana nasib negara ini. Sebagai warga negara Indonesia, pendidikan adalah hak segala bangsa sesuai dengan UUD 1945 yaitu “pemerintah berkewajiban memenuhi hak warganegaranya dalam memperoleh pendidikan untuk menentukan kualitas hidup kedepan suatu bangsa.” Pendidikan menjadi landasan kuat yang diperlukan untuk meraih kemajuan bangsa dan sebagai bekal dalam menghadapi perkembangan zaman dalam setiap prosesnya. Dan undang undang dasar pasal 31 ayat 1 yaitu “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan di negara ini sebenarnya telah menjadi salah satu perhatian khusus untuk dilihat bagaimana akses pemerataan bisa dinikmati oleh semua warga di seluruh Indonesia. Dalam akses pemerataan ada dua aspek yang perlu diperhatikan. Pertama persamaan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yaitu akses pendidikan bisa dinikmati oleh semua penduduk yang berusia sekolah. Kedua, keadilan dalam memperoleh pendidikan yang sama dalam masyarakat yaitu pendidikan bisa diakses antar suku, agama, dan kelompok secara sama.

Pada implementasi pemerataan pendidikan kita bisa melihat kota-kota besar sara dan prasarana pendidikan sudah sangat maju, sedangkan di desa-desa dan beberapa wilayah tertentu Indonesia timur berbanding terbalik, masih banyak ditemukan fasilitas sekolah yang menggunakan sarana dan prasarana seadanya bahkan kurangnya tenaga pengajar, padahal sarpras merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah, dengan adanya pengelolaan yang baik dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sebenarnya permasalahan ini tidak hanya terjadi di desa, pada wilayah perkotaan pun kita masih menemukan tidak meratanya system pendidikan, meskipun dengan

kasus berbeda misalnya anak usia sekolah yang berada pada tingkat ekonomi lemah tidak bisa mengenyam pendidikan karena dia harus bekerja membantu orang tua, walaupun sekolah-sekolah yang biasa dengan kualitas guru dan sarpras yang sederhana, berbeda dengan anak yang secara ekonomi mampu, mereka bisa mengikuti les dan akhirnya mereka masuk sekolah bagus. Dari problema tersebut perlu adanya peningkatan pemerataan pendidikan terutama peningkatan pendidikan terutama yang disasarkan kepada masyarakat kurang mampu dan masyarakat terpencil. Meskipun pada kenyataannya program pemerintah terus bergulir dari program yang dimulai pada 1984 tentang pemerataan pendidikan Sekolah Dasar, lalu pada tahun 1994 wajib belajar pendidikan Sembilan tahun yang merupakan lanjutan dari program wajib belajar 6 tahun, kemudian dilanjutkan dengan pemberian beasiswa yang salah satunya mendorong keterlibatan masyarakat melalui gerakan Nasional Orang Tua Asuh, setelah itu berlanjut ke dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan sebagainya.

Sebelum adanya program zonasi, banyak anak yang baru lulus dari sekolah menengah pertama tidak bisa melanjutkan untuk bersekolah di sekolah sekolah favorit, sehingga tidak terjadinya pemerataan siswa. Dalam arti lain yaitu sekolah dengan kualitas biasa saja semakin biasa saja, sementara sekolah yang terkenal favorit semakin maju pesat. Hal ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan kualitas antar sekolah di kabupaten Sukabumi khususnya.

Melanjutkan upaya pemerintah untuk mempercepat pemerataan pendidikan adalah dengan penetapan system zonasi yang tertera pada permendikbud no 14 tahun 2018, yaitu “Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah”, dengan demikian siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang berkualitas dan diharapkan mampu menyinergikan tripusat pendidikan yaitu sekolah, masyarakat dan keluarga untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat secara umum bahwa tanggung jawab pendidikan tidak hanya di satu pihak, melainkan tanggung jawab bersama. Hal terpenting PPDB Zonasi adalah anak bisa mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah atau

tempat tinggalnya, jika dalam satu zona kelebihan kuota maka dinas pendidikan wajib mencarikan sekolah atau membuka rombongan tambahan, sehingga tidak ada anak yang tidak mendapatkan sekolah.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90 persen dari total jumlah peserta didik yang diterima. Permendikbud No. 17 Tahun 2017 mulai diterapkan pada ajaran baru tahun 2017 yaitu bulan Juli Berdasarkan wawancara dengan salah satu guru diketahui bahwa siswa yang diterima melalui sistem zonasi memiliki kemampuan belajar yang relatif rendah. Mereka cukup kesulitan dalam memahami materi yang telah disampaikan. Berbeda dengan siswa yang diterima melalui jalur prestasi, mereka lebih cepat dalam memahami materi. Bahkan diantara siswa yang diterima melalui sistem zonasi ada siswa yang masih kesulitan dalam membaca.

Dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, tertuang aturan baru soal jalur zonasi. Jalur zonasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah, jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah, dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

Prestasi belajar yang dimiliki para siswa yang diterima melalui sistem zonasi pun tergolong rendah, terlihat dari data nilai hasil ujian tengah semester mata pelajaran PPKn, dari 128 siswa 59 siswa diantaranya mendapatkan nilai yang belum memenuhi kriteria kelulusan minimal yaitu 75.

Berdasarkan permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian mengenai evaluasi sistem zonasi terhadap daya serap Peserta didik di SMAN 1 Cibadak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka masalah pokok yang menjadi kajian adalah:

- 1) Bagaimana pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi?
- 2) Bagaimana pengaruh mutu sekolah dalam meningkatkan daya serap peserta didik?
- 3) Seberapa besar pengaruh sarana prasarana dalam menunjang kegiatan sistem zonasi?
- 4) Bagaimana daya serap peserta didik setelah adanya system zonasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari beberapa rumusan masalah di atas, diantaranya sebagai berikut.

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan sistem zonasi setelah dilaksanakan 2 tahun di SMAN 1 Cibadak.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Tergambarkannya, pelaksanaan penerimaan peserta didik baru berdasarkan sistem zonasi ?
- 2) Terpetakannya pengaruh mutu sekolah dalam meningkatkan daya serap peserta didik? ?
- 3) Teranalisisnya, pengaruh sarana prasarana dalam menunjang kegiatan sistem zonasi?
- 4) terhitungnya prosentasi daya serap siswa dari program zonasi di SMAN 1 Cibadak?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, pada dasarnya penulis akan mengharapkan penelitian ini nantinya dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut.

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memperdalam pemahaman khususnya bagi Departemen Administrasi Pendidikan mengenai pelaksanaan kebijakan pemerintah khususnya kementerian kebudayaan tentang sistem zonasi

2) Secara Operasional

- a) Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pola pikir peneliti khususnya dalam ilmu administrasi pendidikan.
- b) Bagi lembaga sekolah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berarti bagi pihak lembaga sebagai bahan kajian mengenai pengaruh sistem zonasi terhadap partisipasi peserta didik.
- c) Bagi dunia pendidikan pada umumnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan sumber inspirasi untuk lebih memperdalam permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah khususnya sistem zonasi

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Secara umum sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terdiri dari:

Bab I yaitu pendahuluan. Dimana bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi yang akan peneliti laksanakan pada penelitian sebagai dasar utama penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan secara rinci latar belakang dan alasan peneliti untuk meneliti bagaimana mutu layanan tenaga administrasi sekolah berbasis kinerja.

Bab II yaitu kajian pustaka. Pada bab ini peneliti akan menguraikan konsep-konsep dan teori-teori yang melandasi penelitian yang dilakukan baik diperoleh dari buku-buku, penelitian terdahulu, maupun sumber-sumber lain yang mendukung dalam penelitian ini.

Bab III yaitu metode penelitian. Di dalam bab ini terdapat penjabaran secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti sebagai alat untuk memecahkan permasalahan yang diteliti. Didalamnya mencakup mengenai prosedur dan cara melakukan pengujian data yang telah diperoleh, diantaranya terdiri dari lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data dan pengukuran variabel. Metode penelitian yang peneliti gunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Bab IV yaitu temuan dan pembahasan. Pada bab ini peneliti akan memaparkan hasil pengolahan data dan analisis data untuk menghasilkan temuan berkaitan dengan masalah penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, dan pembahasan atau analisis temuan.

Bab V merupakan tahap akhir dari penelitian ini yaitu kesimpulan dan rekomendasi. Dimana dalam bab lima ini terdapat kesimpulan peneliti yang didapat melalui hasil analisis data yang telah dilakukan dalam temuan peneliti. Pada bab ini juga berisi rekomendasi yang didapat dari penafsiran peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan.